

LAPORAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024



**KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi.

Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,36	92,69	102,55%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	90,38	95,94	105,46 %

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

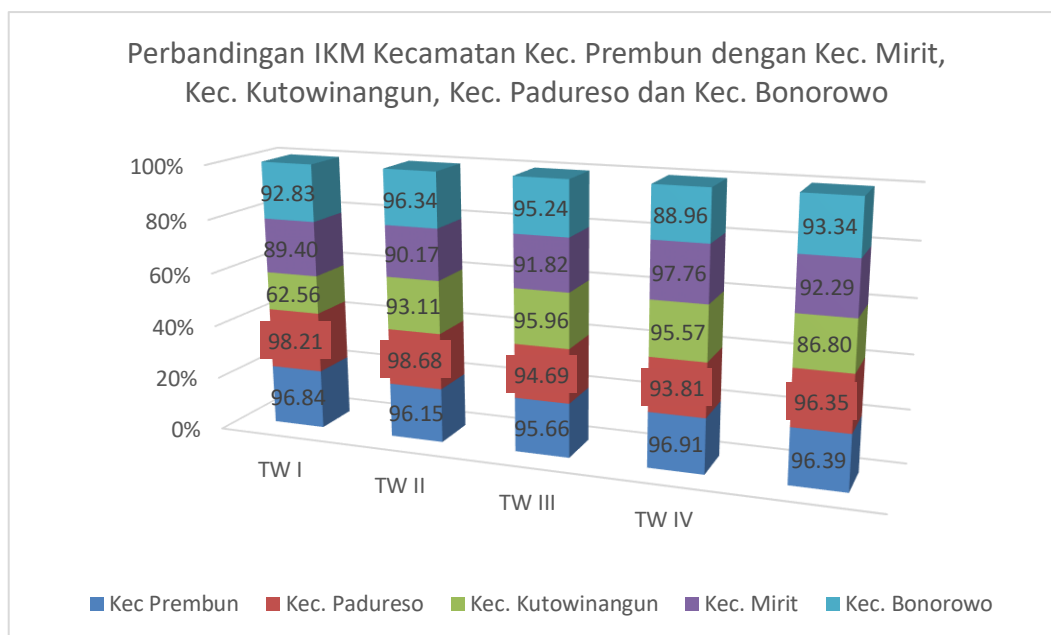
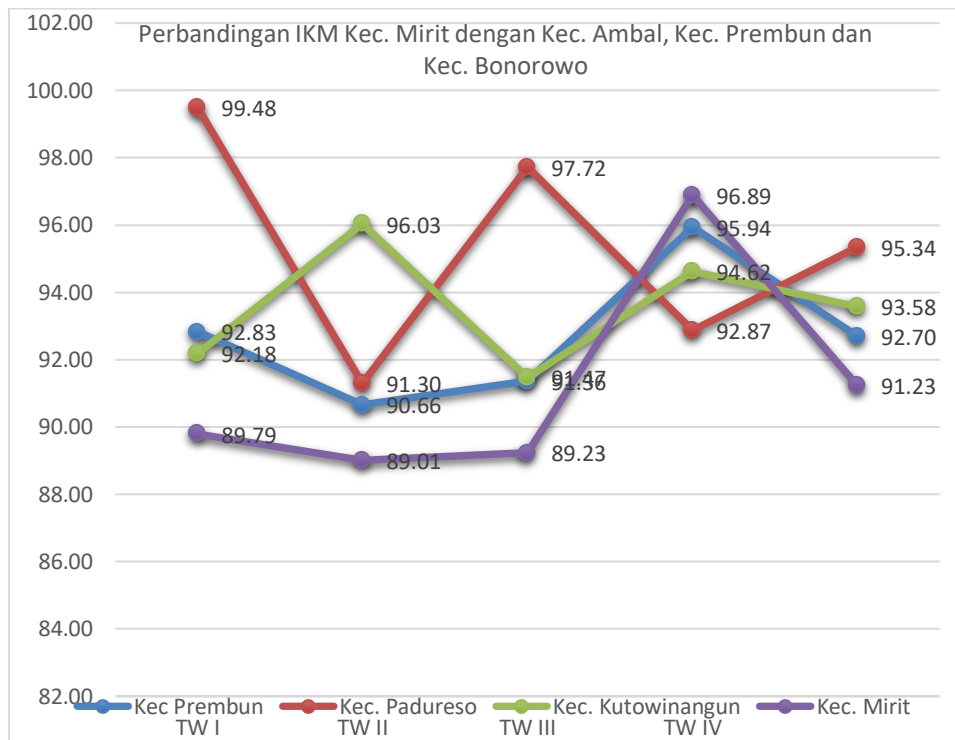
No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,69	90,38	95,94	105,46	92,42	95,81%

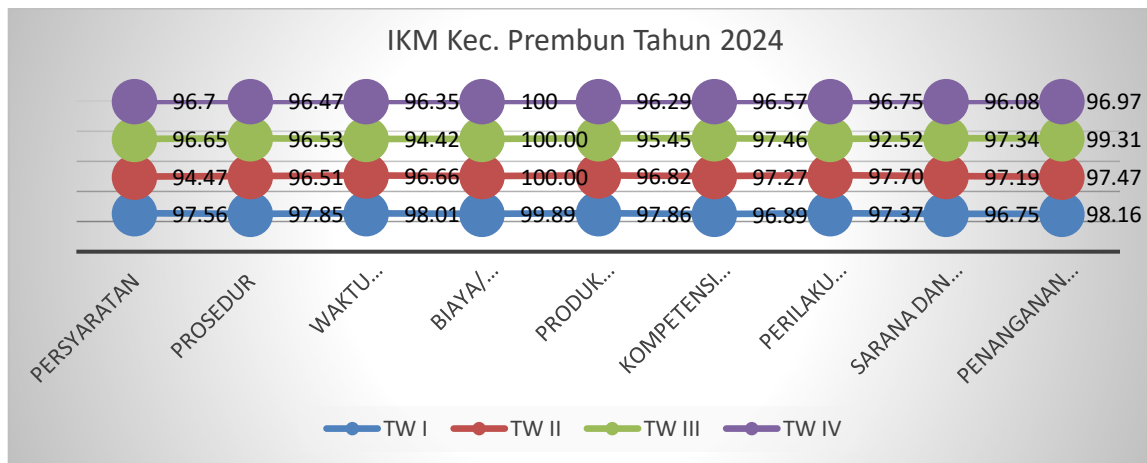
Sumber : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Prembun Tahun 2024

Realisasi IKM tahun 2024 (95,94) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (92,69) dikarenakan pada tahun 2024 masyarakat semakin banyak mengisi survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 105,46% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 belum berhasil baru mencapai 95,81% tetapi sudah **Sangat Baik**.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 (tiga) Kecamatan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:





IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Bonorowo Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Bonorowo pada Triwulan II dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan I, III dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kutowinangun pada Triwulan II namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik

IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Padureso Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Padureso pada Triwulan I,II dan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Prembun
dengan IKM di 3 (tiga) Kecamatan Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec. Prembun		Nilai Kec. Bonorowo		Nilai Kec. Kutowinangun		Nilai Kec. Padureso	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	96,7	Baik	80,79	Baik	98,42	Baik	90,72	Baik
2	Prosedur	96,47	Baik	86,66	Baik	98,4	Baik	91,3	Baik
3	Waktu Pelayanan	96,35	Baik	86,5	Baik	93,7	Baik	91,34	Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik	100	Sangat Baik	97,36	Sangat Baik
5	Produk Layanan	96,29	Baik	86,28	Sangat Baik	94,67	Baik	91,5	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	96,57	Baik	86,31	Sangat Baik	94,37	Sangat Baik	93,25	Baik
7	Perilaku Pelaksana	96,75	Baik	96,84	Sangat Baik	96,67	Baik	96,34	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	96,08	Baik	86,7	Sangat Baik	90,46	Baik	93,66	Baik
9	Penanganan Pengaduan	96,97	Sangat Baik	98,65	Sangat Baik	93,47	Baik	98,78	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Prembun rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sarana dan Prasarana, Produk layanan dan Prosedur.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan rehab ringan agar ruang pelayanan PATEN lebih baik.
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan menginformasikan kepada pengunjung serta mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah Menginformasikan melalui pertemuan Lintas Sektor dan Pertemuan di Desa serta menginformasikan melalui Websitet dan Media sosial (facebook, instagram, twitter).

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,55%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun	105,46%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang urusan pemerintahan daerah	92,46%	Menunjang
			Kegiatan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	99,93%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026)	100%	Menunjang
			Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (Dalev, SAKIP, LKPJ, LKJiP, SPIP, LPPD)	99,99%	Menunjang
			Kegiatan ,Administrasi keuangan perangkat daerah	jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	91,77%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	91,73%	Menunjang
			Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (GU,TU,UP,LS)	100%	Menunjang
			Kegiatan Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas	99,98%	Menunjang
			Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas	99,98%	Menunjang

			Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	99,87%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunkantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor (kabel,lampu,terminal, saklar)	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	98,98%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan danpenggandaan	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	99,07%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	jumlah bulan penyediaan bahan /material	99,87%	Menunjang
			Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	98,67%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penatausahaan arsipdinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi arsip	98,8%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	98,46%	Menunjang
			Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranagedung kantor	98,49%	Menunjang
			KegiatanPenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99,12%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik	jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	98,26%	Menunjang
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umumkantor	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang		Menunjang

			pemerintah daerah	urusan pemerintah daerah		
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	96,18%	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	98,49%	Menunjang
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	99,42%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	98,61%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan Camat	98,61%	Menunjang
			Sub Kegiatan, pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu kelahiran, surat kematian, pindah datang)	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusifitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan ,Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	100%	Menunjang
			Kegiatan ,Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan , Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	99,8%	Menunjang
			Sub Kegiatan,Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	100%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	99,8%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	98,91%	Menunjang
			Sub Kegiatan , Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	jumlah Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam	99.99%	Menunjang
			Sub kegiatan, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	98,83%	Menunjang
			Sub Kegiatan, Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes dan sembako)	100 %	Menunjang
Rata-rata					97.48%	

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 97,48% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Kecamatan Prembun
Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88	92,96	105,65%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Prembun	90,38	95,94	102,55%	3.508.347.000	3.323.991.925	94,75%	5,25%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 5,25% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 21% sampai dengan 21%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.